DAFTAR PUSTAKA

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60

Amar, Rizki., "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Peekawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Tana Mana*, Volume 5 No. 2 (Agustus 2024).

Anam, Khoirul., "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami", Journal tanpa Volume, No, Bulan dan Tahun.

AS, Thariq, Kemal., "Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Luwa Utara," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.

Aziz, Abdul., "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam Analisis Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PA.SAK." Skripsi Fakultas Hukum Keluarga Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Azuaria, Tesza., "Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

Azzahra, Sofia., "Analisis UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Keluarga Tanpa Keturunan di Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen,

Kabupaten Kebumen)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, 2024.

BiroWatpers SSDM Polri, *Buku Paduan Sidang Pembinaan Pranikah di Lingkungan Polri,* (Jakarta: BiroWatpers SSDM, 2017).

Fashol, Imam., "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Volume 8 No. 2 (Juni 2019).

Feronnica, Anita. PAUR SUBBAGWATPERS Bagian SDM di Polresta Tangerang, wawancara dengan penulis di Polresta Tangerang, tanggal 15 Januari 2025.

Hartati, Lismi., "Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma),'' Skripsi Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Indonesia, Keputusan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia, Kepres No. 70 Tahun 2002, Lembaran Lepas 2002, Ps. 4, Ps 6, Ps. 25, Dan Ps. 26.," n.d.

Intihani, Siti, Nur., "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *E-ISSN 2809-8641*, 2024.

Jamaludin, Penasehat Perkawinan (rohaniawan) SDM Polresta Tangerang, wawancara dengan penulis di ruang SDM, tanggal 16 April 2025.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, di akses pada 2 Juli 2025 https://idalamat.com/alamat/2123/kepolisian-resor-kota-polresta-tangerang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3.

Mafaid, Ahmad., "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat", *Journal of Social Community*, Volume 9 No. 1 (Juni 2024).

Mahera, Virahmawaty., "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", *Journal Hukum Islam*, Volume 3 No. 2 (Agustus 2022).

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. I Huruf C.," n.d.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 2 Huruf B.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 7 Huruf a.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 7 Huruf b.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 5 Huruf g.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 3 Huruf i, berbunyi "Iddah ialah batas waktu menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya".

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 5 Huruf c.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 12 Huruf g.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/07/III/1988, Ps. 6 Huruf b.

Mukhtas, Haryadi., "Analisis Model Ideal Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pascareformasi", *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik,* Volume 1 No. 2 (Agustus 2019).

Nita, Mesta, Wahyu., "*Hukum Perkawinan di Indonesia"* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021).

Ny. FA, sebagai seorang istri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekaligus sebagai seorang Ibu Bhayangkari.

Ny. NS, sebagai seorang istri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekaligus sebagai seorang Ibu Bhayangkari.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Rahmatillah, Deni., "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume XVII No. 2 (Desember 2017).

Romadhon, Muhammad., "Tinjuan Yuridis Pembatalan Perkawinan terhadap Permohonan di Pengadilan Agama TanjungKarang (Studi

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk), *JHM,* Volume 4 No. 1 (April 2023).

Rosadi, Muhammad, Farid., "Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia (Studi di Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Sejarah Gedung Presisi Markas Kepolisian Resor Kota Tangerang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wafa, Moh, Ali., *"Hukum Perkawinan di Indonesia"* Yasmi: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Waluyo, Bing., dkk. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 No. 1 (April 2020).

Wiyanti, Ana, Nur., "Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota Polri: Permasalahan dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)," Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Wulandari, Nur, Atina., "Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri pada Polri ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 35.